

Menimbang Isu Politik Identitas Pada Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024

Ombi Romli¹, Elly Nurlia²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mathla'ul Anwar

²Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: Romli.sl0601@gmail.com, ellynurlia@untirta.ac.id

Abstract

Abstract: *The issue of identity politics that emerged in the 2017 DKI Jakarta regional elections gave rise to social conflict in DKI Jakarta, which is known as an area with multicultural society. Some groups interpret identity politics as a negative thing that damages the democratic process because it uses SARA sentiments in winning the election for governor of DKI Jakarta. This research uses a descriptive method with a qualitative approach by collecting data through literature study and interviews. The results of this research show that identity politics emerged triggered by: **First** DKI Jakarta gubernatorial candidate Basuki Cahaya Purnama (Ahok) who comes from the ethnic Chinese minority who is Christian, **second** the existence of the 212 peace movement as a response to the blasphemy of Islam carried out by the Governor of DKI Jakarta, **third** social inequality due to economic domination by ethnic Chinese. The existence of this issue with the jargon "don't elect infidel leaders" is believed to have helped Anis Baswedan's election as Governor of DKI Jakarta in the 2017 Pilkada. Although in the 2017 Pilkada the issue of identity politics had an influence on the election of the governor of DKI Jakarta, in the 2019 presidential election it could be said to have had less significant impact. regarding the election of the President. In the 2024 DKI Jakarta Simultaneous Pilkada, identity politics will reappear if ethnic minorities nominate themselves as candidates for Governor of DKI Jakarta, but the issue of identity politics will not be as strong as in the 2017 DKI Jakarta Pilkada.*

Keywords: *Identity Politics, 2024 Regional Election, DKI Jakarta*

Abstrak

Abstrak: Isu politik identitas yang muncul pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menimbulkan konflik sosial DKI Jakarta yang dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya multikultural. Sebagian kalangan memaknai politik identitas sebagai hal negatif yang merusak proses demokrasi karena menggunakan sentimen SARA dalam memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi Pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan Politik identitas muncul dipicu : **pertama** calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok) yang berasal dari etnik minoritas Cina beragama Kristen, **kedua** adanya gerakan damai 212 sebagai respon penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, **ketiga** kesenjangan sosial atas penguasaan ekonomi oleh etnis Cina. Dengan adanya isu ini dengan jargon "jangan memilih pemimpin kafir" diyakini telah membantu keterpilihan Anis Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Meskipun dalam Pilkada 2017 isu politik identitas berpengaruh terhadap keterpilihan gubernur DKI Jakarta, tetapi dalam pemilihan presiden 2019 dapat dikatakan kurang berdampak signifikan terhadap keterpilihan Presiden. Pada Pilkada Serentak DKI Jakarta tahun 2024 mendatang politik identitas akan muncul kembali jika ada etnis minoritas mencalonkan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, tetapi isu politik identitas tidak akan sekuat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Kata Kunci: Politik Identitas, Pilkada 2024, DKI Jakarta

PENDAHULUAN

Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki posisi strategis dan menentukan arah politik di Indonesia. Meskipun wilayahnya tidak luas dan relatif tidak banyak memiliki jumlah penduduk jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Tetapi karena statusnya sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Negara Indonesia, menjadikan Jakarta selalu menjadi pusat perhatian ketika momen politik Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur). Semua mata masyarakat Indonesia akan tertuju menyorot pada Pilkada Jakarta.

Selain berstatus sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta juga merupakan daerah multikultural dimana hampir seluruh suku bangsa/etnik dan agama di Indonesia berada disana. Dapat dikatakan jika ingin melihat Indonesia, Jakarta merupakan miniatur Indonesia yang dapat menggambarkan berbagai karakter Indonesia dari banyak sisi.

Berdasarkan data direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021, penduduk DKI Jakarta berjumlah 11, 25 Juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 4,13% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 272,23 juta jiwa. Jika dihitung berdasarkan pemeluk agama jumlah penduduk DKI Jakarta adalah 83,81% Islam, 8,56 % Kristen, 3,9% Katolik, 3,53 % Budha, 0,18 % Hindu, 0,01 % Konghucu, dan sisanya berjumlah 260 merupakan pemeluk aliran kepercayaan. Sedangkan jika dihitung berdasarkan suku bangsa komposisi penduduk DKI terdiri dari : Jawa 35,16%, Betawi 27,65%, Sunda 15, 67%, Tionghoa 5,53%, Batak 3,61%, Minang 3,18%, Melayu 1,62%, dan 7,98% merupakan suku yang lainnya (Kusnandar, 2021).

Meskipun masyarakat DKI Jakarta sangat beragam, tetapi mereka sudah terbiasa hidup rukun berdampingan menjalankan kehidupannya ditengah perbedaan-perbedaan yang ada. Namun ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 berlangsung kehidupan sosial masyarakat Jakarta mulai berubah, dimana terjadinya polarisasi yang mengarah pada konflik sosial masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan atau dukungan masyarakat dalam menentukan calon kepada daerah DKI Jakarta. Celaknya polarisasi dan konflik yang hadir berbasis pada sentiment agama yang sensitif dalam isu dan gerakan yang terus diproduksi secara massif, fenomena ini menjadi tantangan baru untuk memahami konteks gerakan politik hari ini pada tataran kritis tentang demokrasi dan keindonesiaan (Lestari, 2019).

Konflik sosial masyarakat Jakarta semakin memanas ketika Pilkada Jakarta tahun 2017 memasuki putaran kedua yang mempertemukan dua pasangan caloh kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu pasangan Basuki Cahaya Purnama dan Djarot Saeful Hidayat dengan

pasangan Anis Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno. menggerakkan masyarakat Muslim sebagai politik identitas dan mendukung kemenangan pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 (Idzam Fautanu, 2020).

Basuki Cahaya Purnama yang lebih dikenal dengan nama Ahok merupakan etnis keturunan Cina yang beragama Kristen merupakan kelompok minoritas, sedangkan Anis Rasyid Baswedan yang biasa dipanggil dengan nama Anis yang berasal dari etnis pribumi Sunda keturunan Arab yang beragama Islam merupakan kelompok mayoritas (Putra, 2017). Pada kulminasinya sentimen mayoritas terhadap isu penistaan agama mereka menghasilkan gerakan masa yang tidak main-main, tercatat jutaan masa memenuhi jalanan ibu kota pada saat itu. Mereka menyuarakan protest dan perlawanan terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama.

Pilkada DKI Jakarta 2017 menjelaskan fakta penting tentang keadaan sebenarnya mengenai kesehatan demokrasi di Indoensia yang kerap diaggap telah mapan. Namun isu agama, ras, etnisitas yang bergulir dalam perhelatan demokrsi di Dki Jakarta 2017 silam menunjukkan bahwa ternyata demokrasi kita belum sekuat itu. Keadaan ini juga berarti potensi yang sama masih sangat mungkin terjadi dalam agenda politik kedepan. Narasi ini senada dengan hasil kajiannya Pransiskus bahwa Pilkada Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 masih memiliki potensi terjadinya polarisasi identitas yang disebut sebagai identitas Legitimasi berupa identitas agama, etnis dan ekonomi. Identitas Resisten berupa Identitas perilaku pemilih rasional dan emosional (Mali, 2021).

Dalam memahami gerakan 212 peneliti tidak sekedar melihat protes masa mayoritas dalam sebuah aksi, tetapi ini juga mengejawantah dominasi kekuatan politik muslim dalam arena politik di Indonesia. Dominasi tersebut kemudian mempertegas garis polarisasi antara warga minoritas dan mayoritas di DKI Jakarta sehingga menimbulkan suasana bernegara yang tidak harmonis (Amin, 2023). kemudian gerakan besar tersebut telah memicu munculnya isu politik identitas di ibu kota. Isu politik identitas sendiri menjadi perdebatan di kalangan akademisi, intelektual, politisi, dan masyarakat yang tidak berkesudahan dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat hingga saat ini.

Politik identitas di Indonesia menurut Maarif dalam kajiannya menyebutkan bahwa sangat erat kaitannya dengan etnis, ras, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya para elit dengan artikulasinya masing-masing (Maarif, 2012). Seirama dengan itu Putra dan Maranjaya dalam kajiannya juga menyebutkan politik indentitas berdampak pada polarisasi masyarakat yang mengarah kepada konflik sosial dan perpecahan (Alif Anandika Putra, 2023). Politik identitas adalah politik yang menggunakan jargon identitas

sebagai pengikat, pemersatu antara seseorang dengan orang lain dalam sebuah kelompok atau komunitas baik berbasis ras, gender, entitas, keagamaan, persamaan, ketidakadilan, dan berbagai kesamaan identitas lainnya.

Politik identitas di Indonesia oleh sebagian kalangan selalu dimaknai negatif karena dianggap berbahaya dapat merusak sendi-sendi kehidupan berdemokrasi yang sedang dibangun dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahkan pada Sidang Tahunan MPR RI pada tanggal 16 Agustus 2022 di gedung DPR/MPR Presiden Joko Widodo mengingatkan *“jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat. Politik identitas harus benar-benar hilang pada saat pemilihan umum 2024”*.

Saat ini di Indonesia sedang memasuki tahun politik dimana pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu Serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak (gubernur, bupati/wali kota). Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada akan dilaksanakan pada bulan September 2024.

Ditengah proses Pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung persaingan kontestasi dalam pencalonan terutama Presiden dan Wakil Presiden sudah mulai memanas dengan berbagai dinamika yang menyertainya. Dari mulai isu politik dinasti, isu politik perubahan, hingga isu politik identitas mulai nampak ke permukaan menjadi bahan perbincangan

Pariduri dan Pujiati dalam studinya juga memaparkan bahwa baru-baru ini muatan bernada “politik identitas” di salah satu stasiun televisi tampil dalam tayangan azan salah satu yang digadang-gandang menjadi calon presiden 2024. Tayangan tersebut sontok menjadi perbincangan dan pengamatan bagi para pengamat politik, ada yang menyebut hal itu termasuk katagori politik identitas. Namun ada juga yang menyebutkan hal tersebut bukan bagian dari politik identitas (Alhidayah Pariduri, 2023).

Meskipun Pilkada DKI Jakarta masih relatif lama yaitu pada bulan September 2024 dan belum ada calon kepala daerahnya, Pilkada DKI Jakarta dipandang menjadi yang paling menarik. Hal ini karena DKI Jakarta dimasa Pilkada sebelumnya tahun 2017 diwarnai oleh konflik horisontal yang diakibatkan oleh isu politik identitas yang dianggap merugikan pasangan calon Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahaya Purnama atau Ahok.

Selain itu Pilkada DKI Jakarta yang masyarakatnya multikultural selalu menjadi barometer dalam mengukur kualitas demokrasi di Indonesia dan dianggap dapat menggambarkan politik Indonesia yang sesungguhnya. Siapapun yang menang dalam Pilkada DKI Jakarta berpotensi besar dapat terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Oleh karena itu Pilkada DKI tahun 2024 masih tetap menarik untuk dikaji, meskipun situasi sosial politik saat ini berbeda dengan situasi Pilkada tahun 2017 maupun Pemilu 2019. Isu politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 penting untuk dikaji sebagai bahan evaluasi proses demokrasi di Indonesia, dan pengembangan keilmuan sosial dan politik.

Tulisan ini bertujuan pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, kedua, untuk mengetahui dampak politik identitas terhadap Pemilu Presiden 2019, dan ketiga, untuk memprediksi apakah isu politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 akan muncul kembali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Whitney (dalam Nazir : 2011) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Creswell (2016), metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kajian Pustaka, dan wawancara terhadap informan yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Data yang terkumpul kemudian dikaji dengan teknik analisis yang dipandu oleh sistem metodologi ala Creswell. Tahapan analisis data sederhananya meliputi proses pemilahan data, pengelompokan data dan penjabaran data yang selanjutnya meninjaunya dengan perspektif teori yang dipakai untuk tiba pada hasil pembahasan yang kokoh dan tajam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam negara demokrasi seperti di Indonesia semua warga negara memiliki posisi yang sama tidak membedakan status seseorang baik itu suku bangsa, gender, maupun agama. Semua memperoleh hak yang sama termasuk hak untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin negara atau pemimpin daerah melalui Pemilu atau Pilkada.

Dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 muncul politik identitas yang diasosiasikan sebagai upaya kandidat tertentu dalam memenangkan Pilkada dengan menggunakan sentimen suku, agama dan ras (SARA). Dalam Pilkada DKI Jakarta yang dimenangkan oleh pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno diyakini dipengaruhi oleh adanya politik identitas dimana

kemenangan Anis Baswedan disebabkan faktor Anis Baswedan bestatus sebagai etnis pribumi dan beragama Islam yang merupakan kelompok mayoritas di DKI Jakarta.

Munculnya Politik Identitas Pada Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017

Kebangkitan politik identitas Islam terjadi melalui upaya pembangunan citra diri dan menegakan harga diri sebagai muslim yang terhina sehingga sesama muslim harus memilih mereka yang seagama dan seiman. Kondisi ini membangun batas kuasa mayoritas kepada mereka yang dipandang minoritas demi mempertahankan demokrasi kekuasaan dan kepentingan elit politik dengan mengatasnamakan agama (Sari, 2016).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pertama, politik identitas muncul pada proses Pilkada DKI Jakarta 2017 dipicu oleh persaingan kontestasi politik antara pasangan Basuki Cahaya Purnama dan Djarot Saeful Hidayat dengan Anis Rasyid Baswedan dan Sadiaga Uno. Diketahui Ahok merupakan sosok yang berasal dari etnis keturunan Cina yang beragama Kristen, sedangkan Anis Baswedan merupakan sosok yang berasal dari suku Sunda keturunan Arab yang beragama Islam. Situasi ini menempatkan Ahok sebagai kelompok minoritas sedangkan Anis ditempatkan sebagai kelompok mayoritas.

Namun demikian, meskipun Ahok sebagai kelompok minoritas, tetapi dalam Pilkada DKI Jakarta secara didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai kekuatan politik nasional mayoritas di Indonesia, Golkar, PPP, PKB, dan Nasdem. Sedangkan Anis meskipun berasal dari kelompok mayoritas didukung oleh partai politik yang bukan pemenang Pemilu yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Perindo (Putra, 2017).

Menurut akademisi FISIP Universitas Lampung istilah kelompok etnis mayoritas dan minoritas sengaja dimunculkan oleh elit politik, bukan berasal dari Masyarakat. Isu ini sengaja diangkat agar pihak-pihak tertentu memperoleh keuntungan secara politik.

Selain didukung oleh partai politik Anis juga didukung oleh kelompok masyarakat etnik Forum Betawi Rempug (FBR) dan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). Ormas FPI dikenal sebagai kelompok fanatik Islam kuat dan kelompok Islam garis keras. Menurut pemahaman dan keyakinan mereka seorang pemimpin itu harus dipimpin oleh seseorang yang beragama Islam bukan kafir. Haram hukumnya umat Islam memiliki pemimpin yang kafir. Dalam setiap kampanye keyakinan mengenai pemimpin harus orang Islam kerap disampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta untuk mempengaruhi pemilih..

Kedua, Politik identitas muncul karena adanya Gerakan 212 pada tanggal 2 Desember tahun 2016 yang dipicu oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang melewati batas mengenai keyakinan agama orang lain (umat Islam). Pidato Ahok

di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 yang menyinggung Al Quran Surat Al-maidah Ayat 51 Tentang pedoman memilih pemimpin dianggap telah menistakan agama.

Peristiwa ini memicu gelombang protes yang masif dari masyarakat muslim seluruh Indonesia yang puncaknya terjadi gelombang demonstrasi yang secara damai pada tanggal 2 Desember 2016 yang dihadiri lebih dari dua juta umat Islam Indonesia yang dikenal dengan gerakan 212. Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah menyatakan apa yang diucapkan oleh Ahok menghina Al Quran dan ulama dan meminta aparat penegak hukum memproses menindak tegas yang bersangkutan.

Gerakan ini akhirnya melahirkan suatu forum yang dikenal dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) diketuai Bachtiar Nasir. Di dalam GNPF-MUI terdapat banyak organisasi kemasyarakatan berbasis Islam termasuk Front Pembela Islam (FPI) yang diketuai oleh Rizik Shihab seorang ulama yang terkenal vocal dan berpengaruh yang menyuarakan agar jangan memilih pemimpin yang kafir.

Peristiwa ini akhirnya melahirkan forum silaturahmi 212 yang menjelma menjadi kekuatan politik besar yang diperhitungkan dalam percaturan politik tahan air. Forum Silaturahmi Gerakan 212 dianggap melahirkan politik identitas yang mendukung dan memenangkan pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Ketiga, Dominasi penguasaan ekonomi oleh etnis minoritas Cina. Tidak dipungkiri meskipun etnis Cina sebagai minoritas, tetapi dalam penguasaan ekonomi mereka merupakan kekuatan dominan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi di Jakarta. Menurut Enjen Zanzawi jika kita perhatian di pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta misalnya sebagian besar sebagian besar perusahaan atau toko-toko dimiliki oleh orang-orang Cina. Sementara itu etnis pribumi yang mayoritas hanya menjadi kelas karyawan atau pekerja di bawah etnis Cina. Kondisi ini tentunya menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang mayoritas pribumi.

Ditambah lagi semenjak Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo ada perubahan perilaku etnik Cina yang seakan-akan akan mereka menjadi kelas atas. Mereka cenderung bersikap sombong, semena-mena terhadap karyawannya yang pribumi. Banyak perilaku-perilaku mereka yang tidak menghargai keberadaan bangsa pribumi. Kondisi inilah yang akhirnya menimbulkan kebencian terhadap etnik Cina dari bangsa pribumi yang bermuara pada sentimen anti Cina dalam Pilkada 2017. Keberadaan etnis Cina menjadi kepala daerah (gubernur) dianggap sebagai ancaman yang serius bagi mereka. Sentimen agama yang tadinya muncul sebagai aksi perjuangan dan solidaritas akan harkat dan martabat agama kaum

mayoritas kemudian menyulut emosional yang lebih luas pada aspek ekonomi dan sosial yang selama ini terjadi antara kelompok minoritas dan mayoritas di Jakarta. Artinya politik identitas telah merangsek masuk dalam kehidupan warga Jakarta dan melukai keakraban bernegara warganya.

Dampak Politik Identitas Pada Pemilu 2019

Menurut Fernandes politik identitas mengalami penguatan bila kontestasi antar-kandidat cukup kuat terutama di daerah dengan komposisi latar-belakang pemilih yang berimbang, baik dari sisi agama, suku, atau ras. Bila kondisi tersebut tidak terjadi, biasanya politik identitas tidak akan mengental seperti DKI Jakarta (Fernandes, 2018). Pada tingkat nasional, pengaruh Pilkada DKI Jakarta dan Aksi 212 lebih terasa di kalangan elit politik dibandingkan pemilih. Dua peristiwa tersebut mempengaruhi perilaku dan pilihan politik partai dan calon presiden dalam menentukan kebijakan dan sikap politik terkait Pilpres. Dari sisi Joko Widodo, pembatalan nama cawapres Joko Widodo dari Mahfud MD menjadi Ma'ruf Amin (Rais Am PB Nahdlatul Ulama) secara cepat, menunjukkan strategi politik untuk merebut suara pemilih muslim. Sementara, dari sisi Prabowo menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan elit politik muslim dalam penentuan cawapres. Elit tersebut tergabung dalam *ijtima' ulama GNPf* (Gerakan Nasional Penjaga Fatwa) MUI, yang dilaksanakan hingga dua kali.

Dari sisi elektoral, mobilisasi pemilih dalam aksi 212 sejauh ini belum signifikan mempengaruhi suara pemilu menjelang pemilu serentak nasional pada 17 April 2019 mendatang. Lemahnya efek massa aksi 212 terhadap politik nasional tampak pada beberapa indikator. *Pertama*, tidak adanya efek langsung aksi 212 terhadap kenaikan atau penurunan suara pasangan calon. Perolehan suara Joko Widodo misalnya tidak mengalami penurunan setelah digelarnya aksi 212 tersebut, begitu juga suara Prabowo Subianto juga tidak mengalami kenaikan signifikan. Sementara survei yang dilakukan Litbang *Kompas* pada 24 September – 5 Oktober 2018 menunjukkan tingkat elektabilitas Jokowi sebesar 52,6% dan Prabowo sebesar 32,7%.

Bila politik identitas bekerja, Joko Widodo yang sering mendapatkan kampanye negatif mengenai politik identitas harusnya mengalami penurunan suara. Namun, suara Jokowi justru mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya dengan Prabowo Subianto yang dekat dengan kelompok organisasi Islam, juga tidak mendapatkan peningkatan suara secara signifikan, bahkan justru mengalami stagnasi

Kedua, dari sisi distribusi suara pendukung dan massa aksi 212 relatif terdistribusi kepada kedua pasangan calon, baik Jokowi maupun Prabowo. Berdasarkan cross tabulasi data

survei CSIS pada April 2018 antara dukungan pemilih terhadap Aksi 212 dengan pilihan calon presiden menunjukkan, pilihan politik pendukung aksi 212 terdistribusi kepada Jokowi dan Prabowo. Jokowi mendapatkan dukungan massa aksi 212 yang lebih tinggi dibandingkan Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prabowo mendapatkan suara yang lebih tinggi dari pendukung 212 di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Sementara di Provinsi Sulawesi Selatan relatifimbang (Lihat tabel 2). Sebagai catatan, data agregat lima provinsi menunjukkan sebesar 67,9% responden pernah mendengar aksi 212, dari 67,9% yang pernah mendengar, sekitar 60% diantaranya mengaku mendukung aksi tersebut. Sementara dari sisi keikutsertakaan dalam aksi tersebut rata-rata sekitar 6%.

Ketiga, partai-partai yang diasosikan dekat dengan gerakan 212 tidak mendapatkan insentif politik yang besar pasca-Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut tampak dari distribusi pendukung massa 212 yang tersebar ke partai-partai dengan ideologi yang berbeda, baik partai berbasis agama atau nasionalis. Begitu juga partai politik yang mendukung pencalonan Ahok atau mendukung calon lain, sama-sama mendapatkan suara dari massa pendukung 212. Secara agregat, Gerindra dipilih oleh sekitar 22,4% pendukung 212 dan PDIP 16,6%, disusul Golkar (10,8%) sebesar tiga besar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik identitas tidak efektif dalam mempengaruhi perolehan suara pada pemilu 2019. Kadaan ini disebabkan :

Pertama, keserentakan waktu pemilihan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Desain pemilu serentak membuat politik identitas tidak dapat bekerja dengan baik, karena isu di pemilu legislatif dan pemilu presiden terbelah. Partai-partai politik yang tidak mempunyai asosiasi langsung dengan calon presiden akan membuat isu yang berbeda dengan capres. Di tingkat lokal, pemilihan isu yang dilakukan caleg diperkirakan juga akan beragam. Caleg biasanya juga akan menyesuaikan dengan konteks sosial politik di tingkat lokal.

Kedua, tidak efektifnya penggunaan politik identitas terlihat dari bergesernya isu kedua pasangan menjadi isu-isu ekonomi dan pembangunan dalam kampanye. Bila ini terus konsisten hingga menjelang waktu pemilihan, diharapkan akan mengurangi munculnya potensi penggunaan isu-isu berbasis identitas. Saat ini, berdasarkan temuan survei CSIS, sejak tiga tahun terakhir, isu ekonomi seperti harga sembako, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan, menjadi perhatian utama dan masalah yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah (Fernandes, 2018).

Menimbang Ulang Isu Politik Identitas Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024

Untuk memahami konteks politik DKI Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang akan sangat sulit memisahkannya dari potensi politik identitas. Pasalnya pilkada 2017 silam di Ibu Kota telah menorehkan warna politik identitas yang kentara. Politik identitas yang hadir tidak skedar terjadi pada tataran narasi tetapi juga menjelma dalam gerak masa yang signifikan dan massif. Bukti konkret bahwa gerakan politik identitas di Jakarta masih berpotensi terulang adalah dengan adanya solidaritas gerakan yang berusaha dipupuk dan dirawat melalui reuni 212. Phenomena gerakan ini menjadi sangat menarik karena tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah aksi masa yang menghasilkan solidaritas gerakan seperti ini baru kali ini terjadi dan itu semua ditengarai oleh latar belakang identitas kolektif. Bahkan gerakan reformasi yang meruntuhkan orde baru juga tidak pernah memiliki wacana reuni. Keadaan ini menunjukkan bahwa ada psikologi masa yang terbentuk oleh identitas yang sama sehingga ada tendensi untuk merawat kolektivitas gerakan mereka.

Jika melihat begitu kuatnya isu agama, rasial dan etnisitas dalam politik di DKI Jakarta 2017 lalu maka sangat mungkin Isu politik Identitas akan muncul kembali pada Pilkada Serentak DKI Jakarta tahun 2024 jika ada peserta calon Kepala Daerah berasal dari kelompok minoritas. Tetapi pada sisi yang lain juga terdapat kemungkinan isu politik identitas tidak akan menjadi isu arus utama dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 dan tidak sekuat pada dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Meskipun politik bersifat dinamis dan konstelasi akan memfalsifikasi isu politik identitas dengan isu-isu lainnya seperti isu pembangunan, kemiskinan, dinasti politik dan lainnya. Namun isu alternatif tadi setidaknya dapat menjadi ruang yang lebih diskursif dalam menguji seorang kandidat daripada mengoyak psikologi masa dengan muatan sentiment identitas agama seperti yang terjadi sebelumnya (Juhana Nasrudin, 2018).

Isu politik identitas pada dimensi politik di DKI Jakarta memang menunjukkan tensi yang lebih rendah pasalnya salah satu faktor melemahnya isu politik identitas dapat ditelusur dari pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah yang diketahui sebagai ormas yang berpengaruh dalam mengkapayekan isu politik identitas pada Pilkada 2017. Dengan adanya perubahan politik dan susunan kekuatan masa yang tidak lagi kokoh seperti sebelumnya memang menjadi masuk akal jika isu politik di ibu kota bergeser pada dialog yang lebih substansial. Selain itu untuk saat ini belum terlihat kandidat gubernur yang memilikilatar belakang agama dan ras yang dapat memicu sensitifitas public. Sehingga ruang bagi isu-isu identitas seperti ini akan menjadi lebih sempit di DKI narasi ini seiring dengan argumentasi berberapa peneliti salah satunya kajian R. Wijayanto Said yang mengemukakan bahwa politik identitas di Indonesia pada 2024 menunjukkan gejala yang lebih rendah karena perjalanan kasus sebelumnya seperti di Jakarta membuat banyak politisi dan partai amat sangat berhati-hati untuk masuk pada isu tersebut (Said, 2023).

Meskipun isu politik identitas tidak sekuat pada Pilkada DKI tahun 2017, tetapi isu ini tetap harus mendapatkan perhatian di DKI Jakarta dengan komposisi masyarakatnya yang multikultural. Perlu adanya penyaman persepsi mengenai isu politik identitas yang selama ini menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama apabila dikaitkan dengan Pemilu atau Pilkada. Narasi ini sejalan dengan kajiannya Arie Sujito yang menjelaskan bahwa dalam perjalanan yang lebih nyata dan Nampak politik identitas yang bergulir di Indonesia dalam banyak momentum demokrasi justru secara serius membajak demokrasi itu sendiri dengan menghentikan demokrasi pada isu sensitif yang emosional dan menegaskan rasionalitas dalam kontestasi (Sujito, 2022).

Oleh karena itu pemerintah perlu memperjelas mengenai apa itu politik identitas dalam aturan kepemiluan agar tidak menimbulkan perdebatan dan konflik sosial di masyarakat DKI Jakarta, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Artinya dalam sistem Pemilu kedepan termasuk pada Pilkada DKI Jakarta diperlukan adanya regulasi yang tegas untuk mengatur isu-isu politik identitas yang memecah belah. Liarnya isu identitas yang hadir pada Pilkada DKI Jakarta 2027 silang terjadi Karena biasanya sejumlah aturan yang tidak spesifik menertibkan proses demokrasi dari praktik kampanye berbasis identitas. Seharusnya semua pihak bersama-sama mendorong dan merumuskan regulasi yang lebih jelas untuk konteks ini mulai dari pemerinta, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu (Ardipandanto, 2020).

Menimbang potensi politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2024 mengantarkan kita pada fakta bahwa kemungkinan terjadinya isu identitas dalam Pilkada DKI masih ada, meskipun situasi politik hari ini menunjukkan adanya pergeseran isu pada ranah yang lebih diskursif dan substansial. Namun untuk mencegah dan mengatasi agar isu identitas tidak membajak demokrasi kita pada Pilkada 2024 haruslah dibangun pemahaman yang utuh dan tegas bahwa politik identitas mencederai demokrasi. Kemudian memahami politik identitas dalam pemilu haruslah juga sama seperti memahami politik uang, yakni memandangnya sebagai sebuah pelanggaran pidana dan etika demokrasi yang serius. Langkah tersebut adalah jalan yang paling memungkinkan dilakukan dalam waktu cepat untuk memitigasi dampak serius politik identitas di Indonesia menjelang Pemilu 2024 (Mansurni Abadia, 2023).

Memahami politik dalam pemilu di Indonesia haruslah mengkajinya pula dari dimensi demokrasi dan persatuan bangsa. Pasalnya hanya dengan memperhatikan aspek itu potensi terjadinya polarisasi karena sentimen identitas yang disulut untuk kepentingan elektoral dapat diminimalisir. Jika kita menoleh kebelakng tentang kasus politik identitas maka kita bisa dengan mudah temukan faktornya adalah multikultural masyarakat dengan berbagai keunikannya terlebih di Ibu Kota. Artinya potensi akan terus ada karena konstruksi dan

keberagaman budaya dan agama juga tetap ada. Namun dengan adanya revitalisasi aturan pemilu dan edukasi terhadap warga akan dampak politik identitas maka Pilkada DKI Jakarta 2024 dapat menjelma menjadi perhelatan demokrasi yang sehat dan substansial.

SIMPULAN

Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 potensi isu politik identitas akan muncul kembali jika ada peserta calon kepala daerah berasal dari kelompok minoritas. Tetapi isu politik identitas tidak akan menjadi isu arus utama dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 sehingga tidak akan berpengaruh kuat seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam Pilkada DKI 2024 isu politik identitas akan digantikan dengan isu-isu politik dinasti, isu pembangunan, isu ekonomi seperti harga sembako, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan, menjadi perhatian utama dan masalah yang dihadapi warga..

Meskipun isu politik identitas terindikasi tidak akan sekuat pada Pilkada DKI tahun 2017, tetapi isu ini tetap harus mendapatkan perhatian dari banyak pihak. mengingat DKI Jakarta yang masyarakatnya multikultural. Perlu adanya penyamaan persepsi mengenai isu politik identitas yang selama ini menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama apabila dikaitkan dengan Pemilu atau Pilkada. Oleh karena itu pemerintah perlu memperjelas mengenai apa itu politik identitas dalam aturan kepemiluan agar tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat DKI Jakarta. Selain itu peneliti berharap agar peneliti selanjutnya mampu menjelaskan secara lebih dalam tentang arah isu politik di Ibu Kota dan mendorongnya dengan pendekatan yang tepat pada isu yang sehat dan substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhidayah Pariduri, P. (2023). Politik Identitas Agama Sebagai Tantangan Pelaksanaan Pesta Demokrasi Di Indoensia Tahun 2024 : Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta . *MUKADIMAH Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Sumatera Utara Vol. 7 No. 2.*
- Alif Anandika Putra, A. K. (2023). Kontradikasi Politik Identitas Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. *Jurnal Ganec Swara Vol 17, No. 2.*
- Amin, S. (2023). *Mengungkap Polariasasi di Jakarta*. Diambil kembali dari sindonews: <https://nasional.sindonews.com/read/1045287/18/mengungkap-polarisasi-di-jakarta-1678672996?showpage=all>
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme. *Politica Vol. 11 No. 1.*
- Fernandes, A. (2018). *Politik Identitas Dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas*. Jakarta: CSIS.

- Idzam Fautanu, B. M. (2020). Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: . *Politicon: Jurnal Ilmu Politik. vol 2 no.2.*
- Juhana Nasrudin, A. A. (2018). POLITIK IDENTITAS DAN REPRESENTASI POLITIK (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022) . *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama vol 1, No. 1.*
- Kusnandar, V. B. (2021). *Jumlah Penduduk DKI Jakarta Menurut Agama Kepercayaan.* Diambil kembali dari [databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/09/terbanyak-83-penduduk-dki-jakarta-beragama-islam](https://databoks.katadata.co.id/databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/09/terbanyak-83-penduduk-dki-jakarta-beragama-islam)
- Lestari, D. (2019). PILKADA DKI JAKARTA 2017: DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DI . *SIMULACRA, Volume 2, NO 1.*
- Maarif, A. S. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita.* Jakarta: Project Yayasan Abad Demokrasi.
- Mali, F. X. (2021). Politik Identitas Pada Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) Vol. 09, No.2 .*
- Mansurni Abadia, C. A. (2023). STRATEGI MITIGASI DAMPAK NEGATIF POLITIK IDENTITAS SEBELUM DAN SESUDAH PEMILU. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol.4, No.2.*
- Putra, L. M. (2017, 06 03). *Lima Parpol Pendukung Ahok Djarot Yakin Ulangi Kesuksesan di Putaran Kedua .* Diambil kembali dari Kompas.com : <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/06/16265581/lima.parpol.pendukung.ahok-djarot.yakin.ulangi.kesuksesan.di.putaran.kedua>
- Said, R. W. (2023). FENOMENA POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILU DI. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol 3, No 1.*
- Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *KRITIS Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Volume 2, No. 2.*
- Sujito, A. (2022). Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024. *Jurnal Pancasila Vol.3, No.2.*